Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, Dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderating

(Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kudus)

¹ Mulyanto

² Nita Andriyani Budiman

³ Muhammad Nuril Fahmi

Universitas Muria Kudus

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima : 2 Januari 2021

Disetujui : 3 Januari 2021

Dipublikasikan : 3 Januari 2021

Keywords:

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, Desentralisasi Fiskal, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, dan desentralisasi fiskal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variabel *moderating*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai OPD Kabupaten Kudus. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 126 responden. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah dan penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan variabel desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sedangkan sistem pengendalian internal pemerintah memperkuat hubungan antara sistem akuntansi keuangan daerah dan penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal pemerintah tidak memoderasi hubungan antara aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan sistem pengendalian internal pemerintah memperlemah hubungan antara desentralisasi fiskal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

¹ Alamat korespondensi :

Universitas Muria Kudus

PENDAHULUAN

Melihat isu-isu dan kondisi beberapa tahun kebelakang ini sangat miris rasanya, banyak organisasi perangkat daerah di Indonesia yang laporan keuangannya mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian tetapi masih banyak kepala pemerintah daerah dan jajarannya yang tertangkap oleh komisi pemberantasan korupsi akibat melakukan kegiatan praktik yang tidak semestinya dilakukan.

Hal ini bisa kita lihat pada pemerintahan Kabupaten Kudus dimana laporan keuangan daerahnya kembali mendapatkan WTP yang diberikan oleh BPK RI perwakilan Jawa Tengah (www.rmoljateng.com). Tetapi pada kenyataannya kepala pemerintahan Kabupaten Kudus yaitu Bupati MT terkena operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK sebagai tersangka terkait kasus jual beli jabatan (www.cnnindonesia.com).

Melihat kondisi seperti ini seharusnya pemerintah daerah lebih mendorong dan menekankan adanya suatu peningkatan berupa sistem yang kuat guna mendapatkan output laporan keuangan yang baik, akuntabel, dan terbebas dari kesalahan, hal ini yang kemudian direspon dan dipertegas oleh pemerintah pusat yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang mengatur sistem pengendalian pemerintah yang mengacu pada konsep pengendalian intern.

Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan proses integral yang kegiatannya dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan serta karyawan guna untuk tercapainya suatu keefektifan dan keefisienan tujuan dari suatu organisasi yang taat

terhadap perundang-undangan di lingkungan pemerintah daerah (PP No 60 Tahun 2008).

Dengan adanya sistem pengendalian internal pemerintah yang kuat dan baik diharapkan mampu menciptakan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dari sebelumnya. Akuntabilitas merupakan suatu pertanggung jawaban yang dilakukan di dalam suatu instansi dimana pihak yang berkepentingan harus mempertanggung jawabkan apa yang telah dia lakukan dan dia kerjakan. Pertanggung jawaban yang dilakukan harus benar-benar sesuai dengan wewenang yang telah dilimpahkan kepadanya untuk melakukan pengelolaan suatu keuangan secara terbuka kepada masyarakat secara luas guna untuk menjalankan amanah rakyat terkait pengelolaan keuangan daerah.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Faktor pertama yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah sangat penting keberadaannya dan harus diperhatikan oleh pemerintah daerah karena mempunyai peran yang sangat kompleks, sistem akuntansi keuangan daerah digunakan untuk menunjang secara langsung bagi semua pihak yang berkepentingan yang terlibat dalam pembuatan suatu laporan keuangan daerah.

Faktor ke dua yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyajian laporan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai

posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan (PP Nomor 24 Tahun 2005). Penyajian laporan keuangan yang lengkap dan secara langsung tersedia dan aksesibilitas bagi pengguna informasi menentukan sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut (Rahma, 2017).

Faktor ketiga yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah aksesibilitas laporan keuangan daerah. Aksesibilitas itu sendiri sangat melekat pada pentingnya masyarakat dalam memperoleh kemudahan untuk menemukan informasi yang mereka butuhkan karena penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi tersebut sangat menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah (Putri, 2017).

Faktor keempat yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah desentralisasi fiskal. Desentralisasi di Indonesia di mulai pada tahun 2001 yang kemudian pelaksanaannya dilakukan secara berangsur-angsur hingga munculnya UU Nomor 33 Tahun 2004 sebagai titik munculnya otonomi daerah, pelaksanaan otonomi daerah berjalan seiringan dengan desentralisasi fiskal, hal inilah yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam hal membangun perekonomian daerahnya karena disamping adanya dana dari pemerintah pusat terdapat juga pemanfaatan desentralisasi itu sendiri. Desentralisasi memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk mendirikan pondasi yang kuat bagi

suatu daerah dalam hal keuangan, yang mana pendanaan itu sendiri akan dapat diterima oleh penyedia dana investor dan kreditur jika pemerintah daerah memiliki akuntabilitas yang baik, dengan demikian dalam konteks akuntabilitas pelaporan keuangan, daerah dapat mewujudkan kemandiriannya karena keuangan atau fiskal daerah sudah terdesentralisasi, dalam artian pemerintah daerah dapat menggunakan kekuasaannya untuk mengelola keuangan untuk kepentingan masyarakat daerah tersebut (Muraiya dan Nadirsyah, 2018).

Munculnya desentralisasi fiskal diharapkan pemerintah daerah mampu mengatur, mengelola, dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada pada daerahnya sehingga bisa menumbuhkan tingkat laju pertumbuhan ekonomi daerah semakin terarah. Desentralisasi sangat berpengaruh pada mandiri atau tidaknya daerah tersebut, jika hal-hal tersebut diperhatikan oleh pemerintah daerah tentu masyarakat semakin percaya terkait kinerja dari pemerintah daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Agency Theory

Teori agensi merupakan teori yang menyatakan adanya hubungan kontrak antara pihak agen dengan pihak prinsipal, dimana pihak prinsipal memperkerjakan agen untuk melakukan tugas-tugas tertentu dan memberikan wewenang dalam pengambilan kebijakan perusahaan (Jensen dan Mackling, 1976).

Teori agensi ini dapat dihubungkan dengan penelitian dimana pemerintah bertindak sebagai pihak agen yang

diberi amanah untuk mengelola keuangan harus memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat sebagai pihak prinsipal yaitu berupa tanggung jawab terkait pengelolaan laporan keuangan yang nantinya bisa dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan pengambilan keputusan. Masyarakat juga menginginkan adanya kinerja yang baik pula dari pemerintah sehingga masyarakat sebagai pihak prinsipal semakin percaya terkait kinerja.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas merupakan suatu pertanggung jawaban yang dilakukan di dalam suatu instansi dimana pihak yang berkepentingan harus mempertanggung jawabkan apa yang telah dia lakukan dan dia kerjakan, sedangkan pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara menyeluruh terkait perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggung jawaban, serta pengawasan dalam hal pengelolaan keuangan dimana diharapkan terciptanya suatu keefektifan dalam pengelolaan keuangan daerah itu sendiri (PP Nomor 58 Tahun 2005).

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai peran yang sangat penting terkait penyampaian sebuah informasi, sistem akuntansi ini digunakan sebagai fasilitas untuk menunjang kinerja dari pemerintah daerah. Sistem akuntansi ini diharapkan bisa memperbaiki sistem pencatatan dan sistem pelaporan menuju ke arah yang semakin baik.

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain yang digunakan untuk mendukung terciptanya fungsi akuntansi dari awal analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di dalam lingkup pemerintah daerah (Permendagri No. 64 Tahun 2013).

Tujuan dari sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebagai alat yang nantinya bisa mewujudkan prinsip-prinsip dasar yang ada pada SAP serta kebijakan akuntansi yang menjadikan serangkaian prosedur pencatatan yang menggunakan pencatatan *double entry* dalam laporan keuangan.

Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Penyajian laporan keuangan merupakan suatu hal yang penting dalam pertanggung jawaban daerah. Pemerintah daerah yang bertindak sebagai pelayan masyarakat diharapkan bisa menyajikan dan menyampaikan informasi keuangan dengan baik. Penyajian yang dilakukan daerah harus sesuai dengan peraturan standar akuntansi yang berlaku dengan memperhatikan karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 penyajian laporan keuangan merupakan penyajian laporan keuangan yang terstruktur dan sistematis terkait posisi dari keuangan serta transaksi-transaksi yang bertujuan untuk memberikan dan menyajikan karakteristik kualitatif laporan informasi mengenai posisi keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah yang harus disajikan adalah: laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo

anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan yang telah selesai dilakukan penyusunan segera mungkin disampaikan kepada publik, penyampaian sebuah laporan keuangan sangat penting dilakukan guna untuk memberikan transparansi dari laporan keuangan tersebut, masyarakat berharap pemerintah daerah bisa menyediakan suatu akses yang mana nantinya laporan keuangan tersebut bisa didapatkan dengan mudah.

Aksesibilitas laporan keuangan menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan kemampuan suatu daerah untuk menyediakan suatu kemudahan akses bagi pihak yang berkepentingan atau pihak *stakeholder* guna untuk mengetahui dan memperoleh sebuah informasi laporan keuangan yang bisa dijadikan untuk pengambilan keputusan.

Ketersediaan kemudahan akses inilah yang nantinya bisa dimanfaatkan masyarakat secara menyeluruh untuk mengetahui informasi-informasi apa saja yang ada di dalam laporan keuangan daerah tersebut dimana masyarakat secara luas bisa memanfaatkan untuk hal-hal yang mereka butuhkan misalnya untuk pengambilan keputusan.

Desentralisasi Fiskal

Pengelolaan keuangan daerah mulai dilaksanakan pada tahun 1999 ketika Indonesia menganut sistem pelaksanaan otonomi daerah dalam badan pemerintahannya yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi

daerah serta meningkatkan sektor perekonomian masyarakat, salah satu cara meningkatkan sektor perekonomian masyarakat yaitu dengan menggunakan program desentralisasi.

Desentralisasi memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk mendirikan pondasi yang kuat bagi suatu daerah dalam hal keuangan, yang mana pendanaan itu sendiri dapat diterima oleh penyedia dana investor dan kreditur jika pemerintah daerah memiliki akuntabilitas yang baik dalam konteks akuntabilitas pelaporan keuangan, dan daerah dapat mewujudkan kemandirian nya karena keuangan atau fiskal daerah sudah terdesentralisasi (Muraiya dan Nadirsyah, 2018).

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 desentralisasi fiskal merupakan pemberian hak atau wewenang untuk mengelola, mengatur, dan memanfaatkan potensi yang ada. Desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah tetapi juga pelimpahan beberapa wewenang pemerintahan ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi dan diharapkan akan menghasilkan manfaat (Mardiaso, 2002: 24).

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Semakin maraknya kasus-kasus kecurangan laporan keuangan diberbagai daerah di Indonesia masyarakat menuntut pemerintah segera melakukan suatu kebijakan yang besar guna untuk meminimalisir kecurangan tersebut, kebijakan yang dilakukan harus benar-benar bisa menekan angka kecurangan dari sebuah laporan keuangan, dari sini

pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa sistem pengendalian internal pemerintah.

Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan proses integral yang kegiatannya dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan serta karyawan guna untuk tercapainya suatu keefektifan dan keefisienan tujuan dari suatu organisasi yang taat terhadap perundang-undangan di lingkungan pemerintah daerah (PP Nomor 60 Tahun 2008).

Munculnya sistem pengendalian internal pemerintah ini diharapkan bisa menekan angka kecurangan dalam keuangan daerah, karena jalannya kegiatan pemerintah daerah selalu dikontrol dan diawasi oleh suatu sistem yang nantinya bisa berperan penting dalam melakukan pendeteksian suatu kecurangan ataupun penggelapan.

Kerangka Pemikiran

Merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Faktor-faktor tersebut antara lain sistem akuntansi keuangan daerah, penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, dan desentralisasi fiskal yang dianggap dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dimoderasi dengan sistem pengendalian internal pemerintah. Keterkaitan antara variabel tersebut digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis

Sumber: Yolanda (2018) dan Friyani (2017) yang dimodifikasi dalam penelitian ini.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain yang digunakan untuk mendukung terciptanya fungsi akuntansi dari awal analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di dalam lingkup pemerintah daerah (Permendagri No. 64 Tahun 2013). Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban yang dilakukan daerah atas apa yang telah dia kerjakan, apabila ketika melakukan proses penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah memperhatikan prosedur-prosedur yang berlaku maka semakin kecil kemungkinan terjadi kesalahan dalam melakukan penyusunan laporan keuangan, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik.

H₁: Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan penyajian informasi keuangan yang di dalamnya memperhatikan karakteristik kualitatif dari laporan keuangan itu sendiri. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari daerah atas wewenang yang diberikan kepadanya, apabila proses penyajian laporan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan maka semakin meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

H₂: Penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,

Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Aksesibilitas laporan keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan akses terkait informasi keuangan. Akuntabilitas merupakan proses pertanggung jawaban dari awal perencanaan sampai dengan pengawasan laporan keuangan daerah, apabila kemudahan dalam mengakses laporan keuangan daerah dipenuhi, maka muncullah proses ketransparansian laporan keuangan daerah yang semakin terbuka dan jelas untuk umum, jika hal tersebut

dilakukan maka pertanggung jawaban atau akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah semakin bermutu dan baik.

H₃: Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Desentralisasi fiskal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Desentralisasi fiskal merupakan wewenang yang diberikan kepada daerah untuk mengatur serta mengelola potensi-potensi yang ada pada suatu daerah. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban yang dilakukan atas wewenang yang telah diberikan kepadanya, apabila pemerintah daerah benar-benar melakukan memanfaatkan potensi-potensi sumberdaya pada daerahnya maka semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga terciptalah pertanggung jawaban yang semakin terarah dan jelas.

H₄: Desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Variabel Moderasi

Sistem pengendalian internal pemerintah diharapkan bisa menjadi pendukung dalam hal mengawasi jalannya pemerintahan daerah, pemerintahan daerah bisa berjalan dengan baik jika memperhatikan proses penyelenggaraan sistem akuntansi di dalamnya, apabila setiap

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah selalu diawasi dan dikontrol oleh sistem pengendalian internal pemerintah maka jalannya proses penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan di daerah semakin baik, sehingga menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin kuat.

H₅: Sistem pengendalian internal pemerintah memperkuat pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Variabel Moderasi

Sistem pengendalian internal merupakan proses pengawasan yang dilakukan secara terus menerus untuk menekan adanya kecurangan di dalam lingkup organisasi, kecurangan bisa ditekan jika diterapkannya penyajian laporan yang baik, penyajian laporan yang baik harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan dan didukung dengan pertanggung jawaban sebagaimana mestinya, apabila pemerintah daerah selalu melakukan pengawasan kepada pemerintah daerah terkait proses penyajian laporan keuangan daerah maka karakteristik kualitatif laporan keuangan daerah semakin terjaga yang nantinya akan berimplikasi pada pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik.

H₆: Sistem pengendalian internal pemerintah memperkuat pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Variabel Moderasi

Sistem pengendalian internal merupakan proses pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus guna untuk mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Aksesibilitas merupakan penyediaan akses guna untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara luas, apabila pemerintah daerah selalu memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh laporan keuangan daerah melalui media seperti, surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, maupun website, maka pertanggung jawaban atau akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menjadi semakin bermutu bermutu.

H₇: Sistem pengendalian internal pemerintah memperkuat pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Variabel Moderasi

Desentralisasi fiskal merupakan pemberian hak atau wewenang kepada daerah untuk melakukan pengelolaan potensi sumber daya yang ada pada daerah tersebut. Pengelolaan potensi sumber daya bisa terwujud jika pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pemerintah daerah benar-benar dijadikan integritas di dalamnya, apabila sistem pengendalian internal pemerintah

benar-benar mengawasi pemerintah daerah dalam hal melakukan pengelolaan dan memanfaatkan potensi-potensi sumberdaya pada daerahnya, maka kecil kemungkinan pemerintah daerah melakukan tindakan *fraud* dalam menjalankan proses desentralisasi fiskal, dengan begitu maka terciptalah pertanggung jawaban atau akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik, terarah, dan jelas.

H₈: Sistem pengendalian internal pemerintah memperkuat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Menurut Sugiyono(2016:38) definisi operasional adalah suatu faktor yang mendeskripsikan suatu rancangan atau variabel sehingga diukur dengan memperhitungkan indikator dari rancangan tersebut. Definisi operasional variabel yaitu penarikan uraian yang menerangkan ciri-ciri karakteristik sesungguhnya dari sebuah rancangan.

Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu pertanggung jawaban yang dilakukan

di dalam suatu instansi terkait perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggung jawaban, serta pengawasan dalam hal pengelolaan keuangan dimana diharapkan terciptanya suatu keefektifan dalam pengelolaan keuangan daerah (PP Nomor 58 Tahun 2005).

Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah sistem akuntansi keuangan daerah, penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, dan desentralisasi fiskal.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X₁)

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain yang digunakan untuk mendukung terciptanya fungsi akuntansi dari awal analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di dalam lingkup pemerintah daerah (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013).

Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X₂)

Penyajian laporan keuangan merupakan penyajian laporan keuangan yang terstruktur dan sistematis terkait posisi dari keuangan serta transaksi-transaksi yang bertujuan untuk memberikan dan menyajikan karakteristik kualitatif laporan informasi mengenai posisi keuangan (PP Nomor 71 Tahun 2010).

Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X₃)

Aksesibilitas laporan keuangan daerah merupakan kemampuan suatu daerah untuk menyediakan suatu kemudahan akses bagi pihak yang berkepentingan atau pihak *stakeholder* guna untuk mengetahui dan memperoleh sebuah informasi laporan keuangan yang bisa dijadikan untuk pengambilan keputusan (Permendagri Nomor 13 2006).

Desentralisasi Fiskal (X4)

Desentralisasi fiskal merupakan pemberian hak atau wewenang untuk mengelola, mengatur, dan memanfaatkan potensi yang ada (UU Nomor 23 Tahun 2014).

Variabel Moderasi

Variabel moderasi merupakan variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian internal pemerintah.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Z)

Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan proses menyeluruh yang kegiatannya dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan serta karyawan yang berdasarkan Undang-Undang di dalam lingkup organisasi daerah guna untuk mencapai tujuan dari organisasi (PP Nomor 60 Tahun 2008).

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka dan bersifat memahami dan menggambarkan fenomena atau gejala sosial yang sedang diteliti, sedangkan penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh

secara langsung dari sumber aslinya yaitu organisasi perangkat daerah Kabupaten Kudus dengan cara menyebarkan atau memberikan kuesioner kepada responden.

Populasi dan Sampel

Populasi

Menurut Lubis (2010: 172) populasi sendiri merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi pada penelitian ini yaitu pegawai yang berada di 42 organisasi perangkat daerah Kabupaten Kudus.

Sampel

Sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2016: 81). Teknik pengambilan sampel pada penelitian yaitu menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan dengan kriteria tertentu. Kriteria dalam penelitian sebagai berikut:

- a) Kepala instansi, bendahara, dan staff bagian keuangan organisasi perangkat daerah Kabupaten Kudus.
- b) Memiliki gelar pendidikan minimal Diploma (D-3).
- c) Mempunyai pengalaman kerja minimal 1 tahun.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif merupakan gambaran dari data penelitian yang dilihat dari nilai rata-rata, nilai standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum, nilai sum, nilai range, nilai

kurtosis, dan nilai skewnes (Ghozali, 2016:15).

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SAKD	116	21	40	32,23	5,282
PLKD	116	25	45	32,98	5,270
ALKD	116	17	30	26,10	2,592
DF	116	22	40	33,05	2,966
SPIP	116	25	45	33,06	4,896
APKD	116	25	40	32,06	2,568
Valid N (listwise)	116				

Sumber: Hasil SPSS yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa semua variabel dalam penelitian mendapatkan nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi yang menggambarkan bahwa sebaran data atau jawaban dari responden satu dengan lainnya tidak jauh berbeda.

Uji Kelayakan Instrumen Penelitian

Uji Validitas

Uji validitas merupakan uji yang harus dilakukan untuk mengukur atau mengetahui valid atau tidak validnya suatu kuesioner (Ghozali, 2013).

Dari hasil Penelitian dapat diketahui bahwa seluruh item-item pernyataan pada kuesioner memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari pada nilai r tabel yaitu 0,1824. Ini menunjukkan bahwa seluruh item-item pernyataan pada kuesioner dinyatakan valid dan syarat dari validitas terpenuhi.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan uji yang harus dilakukan untuk mengukur indikator dari suatu kuesioner (Ghozali, 2013).

Tabel 4.2
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
SAKD	0,928	Reliabel
PLKD	0,935	Reliabel
ALKD	0,769	Reliabel
DF	0,617	Reliabel
SPIP	0,914	Reliabel
APKD	0,733	Reliabel

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa semua variabel pada penelitian mendapatkan nilai *cronbach alpha* > dari 0,60. Ini berarti semua variabel dalam penelitian dapat dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah di dalam model regresi terdapat suatu permasalahan pada asumsi klasik.

Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah nantinya hasil data dari penelitian tersebut berdistribusi normal atau tidaknya (Ghozali, 2013: 160).

Tabel 4.3
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		116
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,06337552
Most Extreme Differences	Absolute	,068
	Positive	,058
	Negative	-,068
Test Statistic		,068
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber : Hasil SPSS yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.3 hasil uji *kolmogorov-smirnov* diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200

berarti lebih besar dari 0,05 (0,059 > 0,05) makadata dalam penelitian dikatakan berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas merupakan pengujian yang harus dilakukan untuk mengetahui apakah di dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2018: 107).

Tabel 4.4
Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
SAKD	,515	1,942	Bebas Multikolinieritas
PLKD	,247	4,051	Bebas Multikolinieritas
ALKD	,516	1,937	Bebas Multikolinieritas
DF	,460	2,176	Bebas Multikolinieritas
SPIP	,240	4,162	Bebas Multikolinieritas

Sumber : Hasil SPSS yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa semua variabel dalam penelitian mendapatkan nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10 sehingga bisa dikatakan semua variabel terbebas dari gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian yang harus dilakukan untuk mengetahui apakah di dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2013: 139).

Tabel 4.5

Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.	Keterangan
1 (Constant)	,054	
SAKD	,161	Bebas Heteroskedastisitas
PLKD	,684	Bebas Heteroskedastisitas
ALKD	,236	Bebas Heteroskedastisitas
DF	,117	Bebas Heteroskedastisitas
SPIP	,306	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber : Hasil SPSS yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.5 hasil uji *park* menyatakan semua variabel dalam penelitian memperoleh nilai signifikansi > 0,05 sehingga dapat dikatakan semua variabel dalam penelitian terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

Moderated Regression Analysis (MRA)

Moderated regression analysis merupakan pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sampel dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderator (Ghozali, 2013: 229).

Tabel 4.6
Uji Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	22,476	4,879	
INST	-,774	,349	-1,591
MWON	-1,360	,433	-2,790
DPR	-,766	,724	-,773
CR	2,914	,575	3,366
GROWTH	,026	,010	1,861
	,039	,012	5,020
	,026	,021	1,540
	,082	,017	-6,768

Sumber : Hasil SPSS yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.6 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut ini:

$$\text{APKD} = 22,476 - 0,774 \text{ SAKD} - 1,360 \text{ PLKD} - 0,766 \text{ ALKD} + 2,914 \text{ DF} + 0,026 \text{ SAKD} * \text{SPIP} + 0,039$$

$$\text{PLKD} \cdot \text{SPIP} + 0,026 \text{ ALKD} \cdot \text{SPIP} - 0,082 \text{ DF} \cdot \text{SPIP} + e$$

Pengujian Hipotesis

Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016: 95).

Tabel 4.7
Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,698 ^a	,487	,449	1,90712

Sumber: data SPSS di olah, 2020

Berdasarkan tabel 4.7 didapati nilai *adjusted R square* sebesar 0,449, yang artinya 44,9% akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh semua variabel dalam penelitian.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016: 96).

Tabel 4.8
Uji Statistik F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	Keterangan
1 Regression	369,407	8	46,176	12,696	,000 ^b	Signifikan
Residual	389,170	107	3,637			
Total	758,578	115				

Sumber : Hasil SPSS yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.8 didapati nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sedangkan nilai $f_{hitung} 12,696 > f_{tabel} 2,45$. Ini berarti nilai $f_{hitung} 12,696 > f_{tabel} 2,45$ sehingga dapat dikatakan

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat dijelaskan oleh sistem akuntansi keuangan daerah, penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, dan desentralisasi fiskal yang di moderasi oleh sistem pengendalian internal pemerintah atau dengan kata lain semua variabel independen dalam penelitian secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T)

Uji statistik t merupakan pengujian yang harus dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara individu variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016: 97).

Tabel 4.9
Uji Statistik T

Model	B	T	Sig.	Keterangan
1 (Constant)		4,606	,000	
SAKD	-1,591	-2,219	,029	H ₁ : Ditolak
PLKD	-2,790	-3,141	,002	H ₂ : Ditolak
ALKD	-,773	-1,059	,292	H ₃ : Ditolak
DF	3,366	5,067	,000	H ₄ : Diterima
SAKD*SPIP	1,861	2,675	,009	H ₅ : Diterima
PLKD*SPIP	5,020	3,352	,002	H ₆ : Diterima
ALKD*SPIP	1,540	1,248	,215	H ₇ : Ditolak
DF*SPIP	-6,768	-4,757	,000	H ₈ : Ditolak

Sumber : Hasil SPSS yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.9 uji statistik t dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Variabel sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) memperoleh nilai $t_{hitung} - 2,219 < \text{nilai } t_{tabel} 1,982$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,029 < 0,05$. Ini berarti hipotesis pertama (H₁) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan

daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah **ditolak**

- 2) Variabel penyajian laporan keuangan daerah (PLKD) memperoleh nilai $t_{hitung} -3,141 < \text{nilai } t_{tabel} 1,982$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$. Ini berarti hipotesis ke dua (H_2) yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah **ditolak**.
- 3) Variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah (ALKD) memperoleh nilai $t_{hitung} -1,059 < \text{nilai } t_{tabel} 1,982$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,292 > 0,05$. Ini berarti hipotesis ke tiga (H_3) yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah **ditolak**.
- 4) Variabel desentralisasi fiskal (DF) memperoleh nilai $t_{hitung} 5,067 > \text{nilai } t_{tabel} 1,982$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Ini berarti hipotesis ke empat (H_4) yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah **diterima**.
- 5) Variabel sistem pengendalian internal memperkuat sistem akuntansi keuangan daerah (SPIP*SAKD) memperoleh nilai $t_{hitung} 2,675 > \text{nilai } t_{tabel} 1,982$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,009 < 0,05$. Ini berarti hipotesis ke lima (H_5) yang

menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah memperkuat pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah **diterima**.

- 6) Variabel sistem pengendalian internal memperkuat penyajian laporan keuangan daerah (SPIP*PLKD) memperoleh nilai $t_{hitung} 3,352 > \text{nilai } t_{tabel} 1,982$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Ini berarti hipotesis ke enam (H_6) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah memperkuat penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah **diterima**.
- 7) Variabel sistem pengendalian internal memperkuat aksesibilitas laporan keuangan daerah (SPIP*ALKD) memperoleh nilai $t_{hitung} 1,248 < \text{nilai } t_{tabel} 1,982$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,215 > 0,05$. Ini berarti hipotesis ke tujuh (H_7) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah memperkuat pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah **ditolak**.
- 8) Variabel sistem pengendalian internal memperkuat desentralisasi fiskal (SPIP*DF) memperoleh nilai $t_{hitung} -4,757 < \text{nilai } t_{tabel} 1,982$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Ini berarti hipotesis ke delapan (H_8) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah memperkuat

pengaruh desentralisasi fiskal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ditolak.

KESIMPULAN

Kesimpulan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- 2) Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- 3) Aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- 4) Desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- 5) Sistem pengendalian internal pemerintah memperkuat pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- 6) Sistem pengendalian internal pemerintah memperkuat pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- 7) Sistem pengendalian internal pemerintah tidak memoderasi pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- 8) Sistem pengendalian internal pemerintah memperlemah pengaruh desentralisasi fiskal

terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak keterbatasan, adapun keterbatasan dari penelitian sebagai berikut:

- 1) Variabel penelitian hanya mampu menghasilkan nilai *adjusted R square* sebesar 44,9% ini berarti yang berarti bahwa sistem akuntansi keuangan daerah, penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, dan desentralisasi fiskal yang di moderasi oleh sistem pengendalian internal pemerintah hanya mempengaruhi sebesar 44,9%, sedangkan tidak menutup kemungkinan sisanya 55,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari penelitian.
- 2) Penelitian yang dilakukan tidak menghadapi responden dengan peneliti secara langsung dikhawatirkan muncul perbedaan persepsi dan tidak dapat mengontrol responden dalam menjawab pernyataan survei.

Saran Penelitian

Berdasarkan keterbatasan tersebut, adapun saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian sebagai berikut:

- 1) Diharapkan bagi pemerintah daerah Kabupaten Kudus supaya lebih memaksimalkan dalam menyediakan kemudahan ruang akses karena dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terbatasnya ketersediaan ruang akses secara luas.
- 2) Diharapkan peneliti berikutnya bisa menambahkan variabel baru

misalnya, menambah variabel kompetensi sumber daya manusia yang merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu instansi, semakin berkualitas sumber daya manusia semakin mampu mengelola keuangan dengan lebih baik (Tanzerina, 2017). Variabel lain yang mungkin bisa digunakan adalah variabel kinerja, kinerja penyelenggaraan OPD mencerminkan capaian kinerja yang dilaksanakan oleh OPD, selain itu juga menggambarkan efisiensi, efektivitas, penghematan, dan produktivitas (Pangalila dkk, 2017).

- 3) Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan memperluas wilayah penelitian misalnya Se-Karisidenan Pati.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Kudus Bulan Desember (2019).
- Friyani, Rita. 2017. Pengaruh Desentralisasi Fiskal, *Good Governance*, dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi). *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2017.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasiona/20190727144335-12-416043/bupati-kudus-jadi-tersangka-korupsi-jual-beli-jabatan> (diakses tanggal 3 Oktober 2019).
- <https://www.rmoljateng.com/read/2019/05/29/19587/Pemkab-Kudus-Raih-Opini-WTP-Tanpa-Catatan-> (diakses tanggal 3 Oktober 2019).
- Jensen, Michael C, dan Mackling, William H. 1976. *Theory of the Firm: Managerial Behavior*. Vol. 3 No. 4: 305-360.
- Lubis, Arfan Ikhsan. 2010. *Akuntansi Keperilakuan*, Edisi 2. Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI, Yogyakarta.
- Muraiya, dan Nadirsyah. 2018. Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Efisiensi dan Efektivitas Penyerapan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol. 3, No. 2, (2018) Halaman 236-253.
- Pangalila, C., Elim, I dan Walandouw, S, K. 2017. Evaluasi Penyusunan Anggaran dan Kinerja Keuangan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. 12(2):1-10.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

- Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis akrual pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Putri. Firstcilia Eldy Putri. 2017// pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas laporan Keuangan Daerah dan Tingkat Pengungkapan Sukarela Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Epiris Pada SKPD Provinsi Riau). *JOM Fekon*, Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017.
- Rahma, Nuria. 2017.Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah (Studi Empiris Pada OPD Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu). *JOM Fekon*, Vol. 4 No. 2 (Oktober) 2017.
- Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hal: 61-118.
- Tanzerina. Desilia. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Pengaruh Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah Sebagai Variabel *Moderating*(Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Tahun 2015). *JOM Fekon*, Vol.4 No.1 (Februari) 2017.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Yolanda. Septia. 2018. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan Daerah, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel *Moderating* (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung). *JOM FEB*, Volume 1 Edisi 1 (Januari – Juni 2018).